

ABSTRAK

Dalam suatu pemerintahan otonom agar terciptanya pemerintahan yang baik, bersih, dan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan maka dibentuklah lembaga pengawas internal pemerintahan yaitu Inspektorat yang dimana Inspektorat ini unsur pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah di bidang pengawasan penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan bahwa pengawasan atas penyelenggara pemerintah daerah dilaksanakan oleh APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) yang meliputi Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi pelaksanaan tugas inspektorat kota kendari dalam pengawasan penyelenggara pemerintah daerah kota kendari 2017-2018. Rumusan Masalah yang diajukan adalah: Bagaimana Implementasi pelaksanaan tugas inspektorat kota kendari dalam melakukan pengawasan penyelenggara pemerintah daerah kota kendari 2017-2018?; Apa saja faktor penghambat pelaksanaan tugas inspektorat kota kendari dalam pengawasan penyelenggara pemerintah daerah kota kendari 2017-2018?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif-sosiologis. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka/dokumen dan wawancara kepada Inspektorat Kota Kendari, kemudian diolah dan dideskripsikan kemudian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama pengawasan oleh Inspektorat terhadap penyelenggara pemerintah daerah dilaksanakan mulai dari tahun 2018 lebih efektif dibandingkan pada tahun 2017 akan tetapi masih ditemukan beberapa kasus yang merugikan negara dan maladministrasi yang dilakukan oleh SKPD yaitu penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah di dinas pertanian dan peternakan yang dimana pejabat pemerintah daerah itu melakukan korupsi dalam proyek pengadaan alat pakan ternak, Kedua terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan inspektorat kota kendari dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah kota kendari yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi pemberdayaan/penguatan peran dan fungsi Inspektorat Kota Kendari melalui : Kebijakan peningkatan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas, Pemerintah Daerah Kota Kendari memberikan anggaran sesuai yang dibutuhkan inspektorat demi kelancaran program

pengawasan yang dilakukan disetiap tahunnya, dan Menjadikan Inspektorat sebagai lembaga vertikal dari pemerintah pusat agar dapat menjaga independensi inspektorat dalam pengawasan.

